

# **HUKUM KEPAILITAN**

## **Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia**





# **Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia**

Novie Afif Mauludin, S.H.,M.H.



# Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia

Copyright © PT Penamuda Media, 2024

**Penulis:**

Novie Afif Mauludin, S.H.,M.H.

**ISBN:** 978-634-7062-38-3

**Penyunting dan Penata Letak:**

Tim PT Penamuda Media

**Desain Sampul:**

Tim PT Penamuda Media

**Penerbit:**

PT Penamuda Media

**Redaksi:**

Casa Sidoarum RT03 Ngentak, Sidoarum Godean Sleman Yogyakarta

Web: [www.penamudamedia.com](http://www.penamudamedia.com)

E-mail: [penamudamedia@gmail.com](mailto:penamudamedia@gmail.com)

Instagram: [@penamudamedia](https://www.instagram.com/penamudamedia)

WhatsApp: +6285700592256

Cetakan Pertama, Januari 2025

x + 293 halaman; 15 x 23 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku dalam bentuk dan  
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit maupun penulis

# Kata Pengantar

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami mempersembahkan buku ini kepada para pembaca, dengan judul Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia. Buku ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan literatur yang komprehensif dan mendalam mengenai hukum kepailitan dan PKPU, yang merupakan dua instrumen penting dalam hukum bisnis dan korporasi di Indonesia.

Hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat, sejalan dengan dinamika perekonomian dan meningkatnya kebutuhan penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur. Sebagai dua mekanisme yang sering menjadi rujukan dalam proses penyelesaian utang, kepailitan dan PKPU berperan penting dalam menjaga keseimbangan kepentingan kedua belah pihak, baik bagi para pengusaha maupun pihak perbankan dan kreditur lainnya. Oleh sebab itu, memahami kedua konsep ini secara mendalam menjadi sangat penting, terutama bagi para praktisi hukum, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat luas yang terlibat atau memiliki kepentingan dalam bidang hukum bisnis.

Buku ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai aspek-aspek fundamental kepailitan dan PKPU di Indonesia, mulai dari konsep dasar, landasan hukum, hingga penerapannya dalam berbagai kasus di dunia nyata. Selain itu, buku ini juga mencoba untuk mengurai tantangan dan isu-isu yang dihadapi dalam penerapan hukum kepailitan dan PKPU, serta memberikan analisis kritis terhadap berbagai kebijakan dan putusan pengadilan yang relevan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran konstruktif demi peningkatan kualitas karya ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua kalangan yang ingin memperdalam pengetahuan tentang hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan menjadi bahan rujukan yang bermanfaat bagi para pembacanya.

Kota, Januari 2025

Penulis

# Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
<b>BAB 1 : Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Kepailitan .....	2
B. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) .....	8
C. Sejarah Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia .....	11
D. Asas-Asas Hukum Kepailitan .....	13
E. Teori Hukum Kepailitan .....	17
F. Tujuan dan Fungsi Hukum Kepailitan .....	21
G. Sumber Hukum Kepailitan dan PKPU .....	24
H. Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia (Perubahan Isi Dan Pasal Dalam Undang-Undang Kepailitan).....	28
I. Evaluasi.....	38
<b>BAB 2 : Dasar Hukum Kepailitan Dan PKPU .....</b>	<b>39</b>
A. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU .....	40
B. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) .....	43
C. Peraturan Lain yang Berkaitan dengan Kepailitan.....	46
D. Evaluasi.....	51
<b>BAB 3 : Pihak yang Berkepentingan .....</b>	<b>52</b>
A. Kreditur .....	53
B. Debitur Pailit .....	55
C. Hakim Niaga .....	56
D. Hakim Pengawas .....	57
E. Kurator .....	58
F. Panitia Kreditur .....	59
G. Pengurus .....	60
H. Evaluasi.....	61
<b>BAB 4 : Syarat dan Proses Kepailitan .....</b>	<b>62</b>
A. Syarat-Syarat untuk Dinyatakan Pailit.....	63
B. Pihak-Pihak yang Berwenang Mengajukan Permohonan Pailit.....	65
C. Prosedur Permohonan Pailit .....	67
D. Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan .....	69

E. Pelaksanaan Putusan Kepailitan.....	72
F. Akibat Hukum Putusan Kepailitan.....	73
G. Evaluasi.....	77
BAB 5 : Perdamaian (Akor) Dalam Kepailitan .....	78
BAB 6 : Pengurusan Harta Pailit, Pencocokan Tagihan-Tagihan dan Pemberesan Harta Pailit .....	87
BAB 7 : Syarat dan Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	94
A. Syarat-Syarat Pengajuan PKPU .....	97
B. Pihak-Pihak yang Berwenang Mengajukan Permohonan PKPU .....	100
C. Prosedur Permohonan PKPU .....	101
D. Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan dalam PKPU.....	105
E. Akhir dari Proses PKPU: Perpanjangan, Perdamaian, atau Kepailitan.....	106
F. Akibat Hukum dari PKPU.....	109
G. Evaluasi.....	110
BAB 8 : Kedudukan dan Hak-Hak Kreditur dalam Proses Kepailitan dan PKPU .....	112
A. Klasifikasi Kreditur : Separatis, Konkuren, dan Preferen .....	114
B. Kedudukan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan .....	117
C. Kedudukan Hukum Kreditur dalam PKPU .....	119
D. Hak-Hak Kreditur dalam Proses Kepailitan.....	121
E. Hak-Hak Kreditur dalam Proses PKPU .....	122
F. Perlindungan Hak Kreditur dalam Kepailitan dan PKPU.....	125
G. Evaluasi.....	126
BAB 9 : Peran Kurator, Hakim Pengawas dan Pengurus dalam Kepailitan dan PKPU .....	128
A. Pengangkatan dan Peran Kurator.....	129
B. Pengangkatan dan Peran Hakim Pengawas.....	130
C. Pengangkatan dan Peran Pengurus.....	132
D. Tugas dan Wewenang Kurator.....	133
E. Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas .....	135
F. Tugas dan Wewenang Pengurus.....	138
G. Pertanggungjawaban Kurator, Hakim Pengawas dan Pengurus .....	139
H. Evaluasi.....	141
BAB 10 : Eksekusi dan Pembagian Aset dalam Kepailitan dan PKPU.....	143



A.	Eksekusi Jaminan oleh Kreditor Separatis .....	144
B.	Pembagian Aset dalam Kepailitan.....	146
C.	Pembagian Aset dalam PKPU .....	148
D.	Peran Pengadilan dalam Pengawasan Eksekusi dan Pembagian Aset .....	150
E.	Kasus-Kasus Terkait Eksekusi dan Pembagian Aset.....	152
F.	Evaluasi.....	158
BAB 11 : Kepailitan Terhadap Harta Warisan.....		160
A.	Evaluasi.....	168
BAB 12 : Rehabilitasi Dalam Kepailitan.....		169
A.	Evaluasi.....	176
BAB 13 : Upaya Hukum dalam Kepailitan dan PKPU .....		178
A.	Kasasi dalam Kasus Kepailitan dan PKPU .....	181
B.	Peninjauan Kembali (PK) dalam Proses Kepailitan dan PKPU.....	184
C.	Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dalam Kepailitan dan PKPU .....	187
D.	Peran Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa (Tugas dan Wewenang Pengadilan Niaga, Pembentukan Pengadilan Niaga, Pemeriksaan Perkara Oleh Hakim, Syarat Pengangkatan Hakim, Tentang Upaya Hukum).....	189
E.	Evaluasi.....	195
BAB 14: Aspek Hukum Pidana Dalam Kepailitan dan PKPU.....		196
BAB 15 : Studi Kasus Kepailitan dan PKPU di Indonesia .....		205
A.	Studi Kasus Kepailitan Terkini.....	206
B.	Studi Kasus PKPU Terkini .....	210
C.	Analisis Putusan Pengadilan dalam Kasus Kepailitan .....	216
D.	Analisis Putusan Pengadilan dalam Kasus PKPU .....	222
E.	Pembelajaran dari Kasus-Kasus untuk Pengembangan Hukum Kepailitan dan PKPU .....	226
F.	Evaluasi.....	231
BAB 16 : Tantangan dan Masa Depan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia .....		232
A.	Tantangan dalam Implementasi Hukum Kepailitan.....	233
B.	Tantangan dalam Implementasi Hukum PKPU.....	238
C.	Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU .....	243
D.	Integrasi Hukum Kepailitan dan PKPU dengan Sistem Hukum Internasional .....	251
E.	Kesimpulan dan Rekomendasi .....	253
F.	Evaluasi.....	257
BAB 17 : Pengaturan Hukum Kepailitan di beberapa Negara.....		258

A. Amerika Serikat .....	259
B. Eropa .....	261
C. Singapura.....	263
D. China .....	267
E. Jepang .....	270
F. Arab Saudi .....	273
G. Contoh kasus perusahaan Indonesia yang dinyatakan pailit di salah satu negara dan bagaimana model penyelesaiannya .	276
H. Evaluasi.....	282
Daftar Pustaka.....	283
Glosarium .....	287
Indeks .....	290
Tentang Penulis.....	292

# BAB 1 : Pendahuluan



# HUKUM KEPAILITAN

## Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia

Buku Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia menyajikan analisis mendalam mengenai dua mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa utang-piutang, yaitu kepailitan dan PKPU. Melalui pemaparan teori, landasan hukum, serta studi kasus, buku ini membantu pembaca memahami prosedur hukum, peran pengadilan, serta hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur dalam proses restrukturisasi utang. Ditulis untuk praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat luas, buku ini menjadi referensi penting dalam memahami dinamika hukum bisnis yang terus berkembang di Indonesia.



PT Penerbit Panamuda Media Godean,  
Yogyakarta  
085700592258  
@panamuda\_media  
panamuda.com